

**PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS SERTA UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN**

(Studi Empiris Pada Perusahaan manufaktur sektor *consumer good* yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :
PANKY PRADANA SUKANDAR
NIM. C2C007099

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Panky Pradana Sukandar
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007099
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS SERTA UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SEKTOR *CONSUMER GOOD*
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-
2012)
Dosen Pembimbing : Dr. H. Rahardja, M.Si, Akt.

Semarang, 1 Mei 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Rahardja, M.Si, Akt.)

NIP. 19491114 198001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Panky Pradana Sukandar
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007099
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS SERTA UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SEKTOR *CONSUMER GOOD*
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-
2012)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi pada tanggal 30 MEI 2014

Tim Penguji :

1. Dr. H.Rahardja, M.Si, Akt. (.....)
2. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E, M.Si, Akt (.....)
3. Aditya Septiani, S.E, M.Si, Akt (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D, Akt
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Panky Pradana Sukandar, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan manufaktur sektor *consumer good* yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Mei 2014

Yang membuat pernyataan,

PANKY PRADANA SUKANDAR

NIM. C2C007099

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK BERUBAH !!!

BERJUANG BERJUANG DAN BERJUANG !!!

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

*Ayah dan Ibu tercinta, serta kedua mertua untuk kesabaran, kasih sayang, yang
tanpa batas serta untaian doa yang tak pernah putus.*

*Istri dan anakku tercinta, dan kedua adikku tersayang atas semangat, doa,
canda, dan tawa.*

Keluarga besar Pekalongan, Slawi, dan Kendal

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze how much influence the board of directors, board of commissioners, as well as the size of the company to the company's financial performance in the consumer goods sector manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The factors examined in this study is the performance of the company as the dependent variable while the size of the board of directors, board size, and the size of the company as an independent variable.

The sample consists of 98 companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) and submit financial reports to Bapepam consistently in the period 2010-2012. The data used in this study are secondary data and selection of samples using purposive sampling method. The analytical tool used is multiple regression analysis to examine the effect of the size of the board of directors, board of commissioners, and the size of the company or the company's financial performance.

As the results of the research indicate that the board of commissioners and the size of the company does not have a significant effect on CFROA or financial performance. While the board of directors has a significant influence on CFROA or financial performance.

Keywords: corporate governance, board of directors, board of commissioners, firm size, firm performance, CFROA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer good* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan sebagai variabel dependen sedangkan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

Sampel penelitian ini terdiri dari 98 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam secara konsisten dalam periode tahun 2010-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda untuk mengujipengaruh ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CFROA atau kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CFROA atau kinerja keuangan perusahaan.

Kata kunci : *corporate governance*, dewan direksi, dewan komisaris, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, *CFROA*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Good* yang Terdaftar di BEI 2010-2012)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari telah menerima banyak bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Seiring dengan rasa syukur yang tiada henti kehadirat ALLAH SWT, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rahardja, M.Si., Akt. atas waktu, kesabaran, dorongan, pengarahan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, dan Bapak Marsono, SE, M.Adv. Acc. Akt selaku Dosen Wali.
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan kepada penulis. Seluruh karyawan dan staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
4. Ibunda tercinta yang selalu berjuang, berdoa, dan senantiasa memberikan dorongan serta dukungan kepada penulis. Ayah, atas seluruh perjuangan, dukungan, doa dan harapan yang selalu menjadi pendorong bagi penulis.

5. Istri tercinta, Ulfa Wiwit Chasanah, serta anakku tercinta Haira Mikayla Kyfara Ramadhani yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua adikku tersayang Destriyana Dwi P.S. dan Wietha Tri P.S atas semua dorongan dan motivasinya. Sepupu tercinta Firman Dwi Laksono.
7. Seluruh teman-teman Akuntansi 2007 Iqbal Bukhori, Tegar Rahardi, Titus Bayu, Adi Priguno, Santiko Wicaksono, Satrio Laras Wicaksono yang pernah berbagi, berdiskusi, bertukar pikiran dan memberikan motivasi.
8. Keluarga, teman, sahabat di organisasi kepemudaan (Sapma Pemuda Pancasila) yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta menjalani pendidikan kuliah dari awal hingga akhir.

Semoga semua amal kebaikan pihak-pihak yang terkait mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis,

PANKY PRADANA SUKANDAR

NIM.C2C007099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TELAAH PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	15
2.1.2. Corporate Governance	19
2.1.2.1. Pengertian Corporate Governance	19
2.1.2.2. Prinsip Corporate Governance.....	21
2.1.2.3. Struktur Corporate Governance	23
2.1.3. Mekanisme Corporate Governance	28
2.1.3.1. Dewan komisaris.....	29
2.1.3.2. Dewan Direksi	31

2.1.4.	Ukuran Perusahaan	32
2.1.5.	Kinerja Perusahaan	32
2.2.	Penelitian Terdahulu	35
2.3.	Kerangka Pemikiran	40
2.4.	Perumusan Hipotesis.....	41
2.4.1.	Hubungan antara Ukuran Dewan Direksi dengan Kinerja Perusahaan	41
2.4.2.	Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Kinerja Perusahaan .	43
2.4.3.	Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan.....	44
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	46
3.1.1.	Variabel terikat (<i>Dependent Variable</i>)	46
3.1.2.	Variabel bebas (<i>Independent Variable</i>)	47
3.2.	Populasi dan Sampel.....	48
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	49
3.5.	Metode Analisis Data.....	50
3.5.1.	Uji Statistik Deskriptif.....	50
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik.....	51
3.5.2.1.	Uji Multikolinieritas	51
3.5.2.2.	Uji Heteroskedastisitas	52
3.5.2.3.	Uji Normalitas.....	52
3.5.2.4.	Uji Autokorelasi.....	53
3.5.3.	Analisis Regresi	54
3.5.3.1.	Koefisien Determinasi (R^2).....	55
3.5.3.2.	Uji Singifikansi Simultan (Uji F statistik)	56
3.5.3.3.	Uji Hipotesis	56
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1.	Deskripsi Penelitian	58
4.2.	Analisis Data.....	60
4.2.1.	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.2.1.1.	Uji Normalitas.....	60

4.2.1.2.	Uji multikolinieritas	63
4.2.1.3.	Uji Heteroskedastisitas	64
4.2.1.4.	Uji Autokorelasi.....	65
4.2.2.	Analisis Regresi	66
4.2.2.1.	Uji F Statistik (Overall Test)	66
4.2.2.2.	Koefisien Determinasi (R^2).....	67
4.2.2.3.	Uji t	68
4.2.2.4.	Uji Hipotesis	69
4.2.2.4.1.	Pengaruh Ukuran dewan komisaris terhadap CFROA	69
4.2.2.4.2.	Pengaruh Ukuran dewan direksi terhadap CFROA	70
4.2.2.4.3.	Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap CFROA	70
4.3.	Pembahasan	70
4.3.1.	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap CFROA	70
4.3.2.	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap CFROA	71
4.3.3.	Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap CFROA	72
BAB V	74
PENUTUP	74
5.1.	Kesimpulan	74
5.2.	Keterbatasan.....	74
5.3.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan penelitian terdahulu	37
Tabel 3.2	Keputusan Uji Autokorelasi.....	54
Tabel 4.1	Perincian sampel penelitian	58
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.2	Uji Multikolinieritas.....	63
Tabel 4.3	Uji Autokorelasi Model Regresi	66
Tabel 4.4	Uji F Model Regresi.....	67
Tabel 4.5	Koefisien determinasi model regresi.....	68
Tabel 4.6	Uji t Model Regresi.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Corporate Governance.....	23
Gambar 2.2	The Anglo-American system atau Single-board system	26
Gambar 2.3	Continental Europe System atau Dual-board system	27
Gambar 2.4	<i>Dual-board sistem</i> yang berlaku di Indonesia.....	28
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	41
Gambar 4.1	Uji normalitas awal.....	61
Gambar 4.2	Uji normalitas setelah transformasi ln.....	62
Gambar 4.3	Uji Heteroskadasitas Model Regresi	64

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	80
LAMPIRAN B	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003).

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, dkk., 2004).

IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) mendefinisikan konsep *Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional

perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Lebih lanjut IICG mendefinisikan pengertian mengenai *Corporate Governance* yang baik sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa *Corporate Governance* merupakan serangkaian mekanisme, yang mana mekanisme tersebut terdiri dari struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Struktur memiliki peranan yang sangat fundamental dalam implementasi suatu mekanisme *corporate governance*. IICG mendefinisikan struktur sebagai susunan atau rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di antara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi dan RUPS/pemegang saham) dan stakeholder lainnya, serta aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan.

Sementara sistem merupakan prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa struktur merupakan kerangka dasar tempat diletakkannya elemen-elemen dari sistem dalam penyusunan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan. Elemen penting lainnya yaitu proses. Proses sebagai kegiatan mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai

tujuan perusahaan, menelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Hal ini mengisyaratkan bahwa apa yang disebut proses merupakan elemen yang penerapannya membutuhkan adanya struktur dan sistem yang mengaturnya. Karena itu, proses yang ada dalam suatu perusahaan, sangat dipengaruhi oleh sistem yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Dalam penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya

Menurut James D. Wolfensohn terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Sedangkan, *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen and Meckling (1976) memandang bahwa manajemen sebagai *agent* bagi para pemegang saham. *Agent* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam model *stewardship theory*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya

Dalam *agency theory*, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (karyawan) sebagai *agent* untuk dapat memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan atau melimpahkan tanggung jawab dan wewenangnya terhadap *agent* tersebut (Jensen dan Mecking, 1976). Seorang manajer sebagai pengelola perusahaan pada akhirnya akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, seorang manajer berkewajiban untuk memberikan informasi perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada perusahaan. Kondisi ini yang disebut dengan informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Hardikasari, 2011). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja keuangan pada perusahaan.

Ide dasar pengelolaan *agency theory* memberikan cara pandang baru mengenai *corporate governance*. Perusahaan ditunjukkan sebagai suatu hubungan kerja sama antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Adanya *vested interest* manajemen mengakibatkan perlunya proses *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen.

Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi di sisi lain, perusahaan besar juga dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan *corporate*

governance yang lebih baik. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (Hapsari, 2011). Menurut Graham *et al* (dalam Che Hat, 2008), biaya yang dikeluarkan akibat tata kelola perusahaan yang buruk sebagian besar ditanggung oleh pemegang saham minoritas, seperti yang terjadi di pasar negara berkembang seperti Indonesia dimana banyak perusahaan publik yang dimiliki keluarga. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan investor adalah memiliki praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik yang dapat menyebabkan laporan keuangan yang lebih baik serta pengungkapan dan pelaporan bisnis yang lebih transparan.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana ekstern. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (*The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2006*). Mekanisme *corporate*

governance yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Di Indonesia, permasalahan *Corporate Governance* mengemuka sejak terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia, dan semakin menjadi perhatian akibat banyak terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan. Boediono (dalam Hardikasari, 2011), menyebutkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksinya indikasi manipulasi.

Permasalahan *Corporate Governance* mencuat menjadi perhatian dunia setelah terungkapnya skandal dan bentuk korupsi korporasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Enron bergerak dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, kertas dan komunikasi. Skandal ini juga melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik *Big Five* saat itu, yaitu KAP Arthur Andersen. Skandal Enron dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan dengan melakukan *mark-up* laba perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya. Kasus ini kemudian menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang merupakan auditor Enron dan mengakibatkan Arthur Andersen ditutup secara global.

Skandal yang dilakukan sejumlah perusahaan seperti Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, dan WorldCom menyebabkan

tercetusnya *Sarbanes Oxley*. *Sarbanes Oxley* adalah nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan dewan perusahaan hingga hukuman pidana. Inti utama dari undang-undang ini adalah upaya untuk lebih meningkatkan pertanggungjawaban keuangan perusahaan publik (Sekaredi, 2011). Undang-undang ini berpengaruh signifikan terhadap manajemen perusahaan publik, akuntan publik (auditor), dan pengacara di pasar modal. Mengingat sifatnya yang sangat ketat dan berdampak luas, undang-undang ini terbilang kontroversial dan menjadi polemik (Sekaredi, 2011).

Isu mengenai *Corporate Governance* (CG) menjadi kembali menarik setelah beberapa perusahaan besar dan bonafit yang berbasis di Amerika Serikat seperti Goldman Sachs, Bear Stern, Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan Lehman Brothers, satu per satu tumbang (Iqbal, 2012). Hal ini mengingatkan tentang awal mencuatnya *Corporate Governance* menjadi perhatian dunia internasional.

Rendahnya *corporate governance*, hubungan investor yang lemah, kurangnya tingkat transparansi, ketidak efisienan dalam laporan keuangan, dan masih kurangnya penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu dan alasan beberapa perusahaan di Indonesia runtuh (Hardikasari, 2011). Akumulasi permasalahan yang terjadi ini menyebabkan timbulnya perhatian yang besar terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kepedulian terhadap standar pengelolaan perusahaan, meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan investor,

lembaga regulator seperti BAPEPAM LK dan BEI harus menekan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Sistem *Corporate Governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (ICG).

Menurut Frost *et al* (dalam Che Hat, 2008), perbaikan dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap pengungkapan pelaporan yang lebih baik dalam suatu bisnis yang pada gilirannya nanti dapat memfasilitasi likuiditas pasar yang lebih besar dan struktur modal di pasar negara berkembang. Dengan demikian, tata kelola perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi investor, perusahaan asuransi, regulator, kreditor, pelanggan, karyawan dan stakeholder lainnya.

KNKG (sebelumnya KNKCG atau Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 1999) merupakan komite yang dibentuk pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/31/M.EKUI/08/1999 yang kemudian direvisi dalam

KEP/49/M.EKON/11/2004. Komite inilah yang bertugas merekomendasikan dan mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (terakhir direvisi tahun 2006). Pedoman Umum *GCG* yang dikeluarkan KNKG (2006) ini bukanlah merupakan peraturan perundangan, sehingga masing-masing perusahaan diharapkan mempraktekkan *GCG* atas dasar kesadaran sendiri. Akan tetapi prinsip-prinsip yang termuat dalam Pedoman Umum *GCG* ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator (BAPEPAM-LK, dan BEI) dalam menetapkan peraturan-peraturan sehingga mendukung meluasnya praktek *GCG* di Indonesia.

Penelitian mengenai hubungan antara *Corporate Governance* dengan kinerja telah banyak dilakukan. Salah satunya Darmawati *et al* (2005) meneliti hubungan antara *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survei IICG dan majalah SWA tentang implementasi *GCG* didalam perusahaan tahun 2001 dan 2002 yaitu CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sebagai proksi variabel *corporate governance*. Sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan *Return on Equity/ ROE* dan nilai pasar perusahaan (*Tobin's Q*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance* secara statistik signifikan mempengaruhi *ROE*, tetapi tidak mempengaruhi *Tobin's Q*.

Penelitian lain yang merumuskan tentang hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Che Hat *et al* (2008). Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan *timelines* dan *disclosure*. Selain itu, penelitian ini menemukan pula bahwa

timelines dan *disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Sekareidi (2011), penelitian dilakukan dengan metode *purposive sample*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan LQ45 periode tahun 2005 sampai dengan 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (*CFROA*), dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar (*Tobins Q*), sedangkan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar.

Hardikasari (2011) juga melakukan penelitian dengan objek perusahaan-perusahaan perbankan. Indikator mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini terdiri ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Sampel dalam penelitian tersebut adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda, pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian Hardikasari (2011) ini menunjukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara

signifikan terhadap kinerja keuangan, Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Iqbal (2012) melakukan penelitian yang hampir sama dengan Hardikasari (2011), tetapi dengan objek penelitian dan teknik *sampling* yang berbeda. Penelitian ini mengkhususkan tujuan penelitiannya untuk menguji pengaruh ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. *Proxy* dewan komisaris dan dewan direksi adalah jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi. Penelitian ini mengambil sample perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 dengan metode *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik jumlah anggota dewan direksi maupun dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Dari sekian banyak hasil penelitian mengenai mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja tersebut, terlihat hasil yang cukup beragam. Akan tetapi, hasil yang beragam tersebut juga dipengaruhi perbedaan variabel yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Perbedaan variabel yang digunakan para peneliti untuk merefleksikan beragamnya indikator mekanisme *Corporate Governance* disebabkan luasnya definisi mekanisme *Corporate Governance* tersebut (Darmawati, 2005).

Dalam penelitian sebelumnya, peneliti yang ada menggunakan *proxy* jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah dewan direksi dalam mengukur pengaruh variabel dewan direksi dan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Meskipun dengan *proxy* variabel yang sama, akan tetapi hasil

penelitian tetap beragam. Karena itu, penelitian ini ingin mengungkap apakah komposisi struktur *internal* perusahaan ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan *proxy* yang berbeda. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis mengambil judul "PENGARUH UKURAN DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Good* yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2012)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan direksi dan dewan komisaris serta ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini diukur melalui kinerja keuangan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Sementara

mekanisme internal *Corporate Governance* sendiri terdiri dari indikator: ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris, kemudian ukuran perusahaan.

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi perkembangan dunia akademik, penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai peranan *Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang telah banyak dilakukan sebelumnya.
2. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran mengenai peranan dan praktik *Corporate Governance*.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan , Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah secara garis besar mengenai penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau *good corporate governance*, yang kemudian ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dan juga kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka , Bagian ini menguraikan tentang telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, teori keagenan, pengertian *corporate governance* secara garis besar, prinsip *corporate governance*, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan pembahasan singkat beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian , Bagian ini menguraikan deskripsi operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Analisis , Bagian ini menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil yang didasarkan pada hasil analisis data.

Bab V Penutup , Bagian ini merupakan bab terakhir skripsi. Di dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan serta saran yang relevan dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif *agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat di kontrak.

Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan professional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer sebagai *agent* akan memperoleh kompensasi sesuai dengan

kontrak yang ada. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Emirzon, 2007). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi adalah komoditas yang dapat dibeli. Pihak manajemen atau manajer, merupakan kunci dari segala sumber informasi yang beredar di lingkungan perusahaan. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan daripada *principal*. Dengan informasi yang dimilikinya tersebut, manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik. Para *agent* berkepentingan untuk mendapatkan imbalan yang sesuai untuk kinerjanya dalam mengoperasikan perusahaan.

Pihak *principal* sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada *agent* untuk

memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap *agent* oleh para *principal*, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh *principal* tidak memuaskan, *principal* dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric Information* adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*, ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* sebaliknya, *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Dengan semakin tingginya asimetri informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan

memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan ada tiga jenis *agency cost*. Prinsipal dapat membatasi penyimpangan (*divergencies*) kepentingan dengan menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dirancang untuk membatasi penyimpangan aktivitas yang dilakukan agen. Yang kedua, dalam beberapa situasi tertentu prinsipal memberikan kesempatan kepada agen untuk membelanjakan sumber daya perubahan (biaya *bonding/bonding cost*) yang diharapkan dapat menjamin bahwa *agent* tidak akan bertindak merugikan *principal*. Nilai uang yang ekuivalen dengan kesejahteraan dialami oleh prinsipal yang juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan kagenan. Biaya yang sejenis ini disebut dengan biaya kerugian residual (*residual cost*).

Hubungan antara *principal* dan *agent* ini, merupakan hal mendasar bagi praktek penerapan *Corporate Governance* secara luas. Hal ini dapat kita lihat dalam teori-teori yang melandasi pengertian mengenai perusahaan sebagai tempat penerapan *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*) (Tjager, 2003). *Shareholding theory* menyatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Sementara itu, *Stakeholding theory*, menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan

2.1.2. *Corporate Governance*

2.1.2.1. *Pengertian Corporate Governance*

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Organization for Economic Cooperation and Development (2004) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Dalam Isgiyarta dan Tristiarini (2005), *Malaysian High Level Finance Committee on Corporate Governance* mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain.

Corporate governance merupakan seperangkat prinsip yang mengatur tentang perusahaan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diungkapkan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal. Sabrina (2010) mendefinisikan *corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan kinerja. Sementara itu, Forum *Corporate Governance* in Indonesia (2000) menggunakan definisi *corporate governance* dari Cadbury Committee yaitu:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Adanya *corporate governance* akan memberikan batasan bagi manajemen untuk bertindak diluar kendali pemilik perusahaan seperti misalnya tindakan eksplorasi. Tindakan eksplorasi merupakan tindakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum disertai pemberian ganti rugi (Sabrina, 2010). Tindakan tersebut muncul karena adanya hubungan keagenan antara pemilik (pemegang saham) perusahaan dengan agen (manajemen). Konflik kepentingan terjadi saat manajemen bertindak tidak sesuai dengan kehendak pemilik. Hal itu akan menimbulkan biaya agensi. *Corporate governance* menawarkan solusi secara legal dengan mengatur sistem tata kelola perusahaan dan pengungkapannya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa esensi dari *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2.1.2.2. Prinsip *Corporate Governance*

Dalam *corporate governance* terdapat empat unsur yang menjadi prinsip-prinsip dalam *corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*Trasnparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Akuntabilitas

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai social. Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

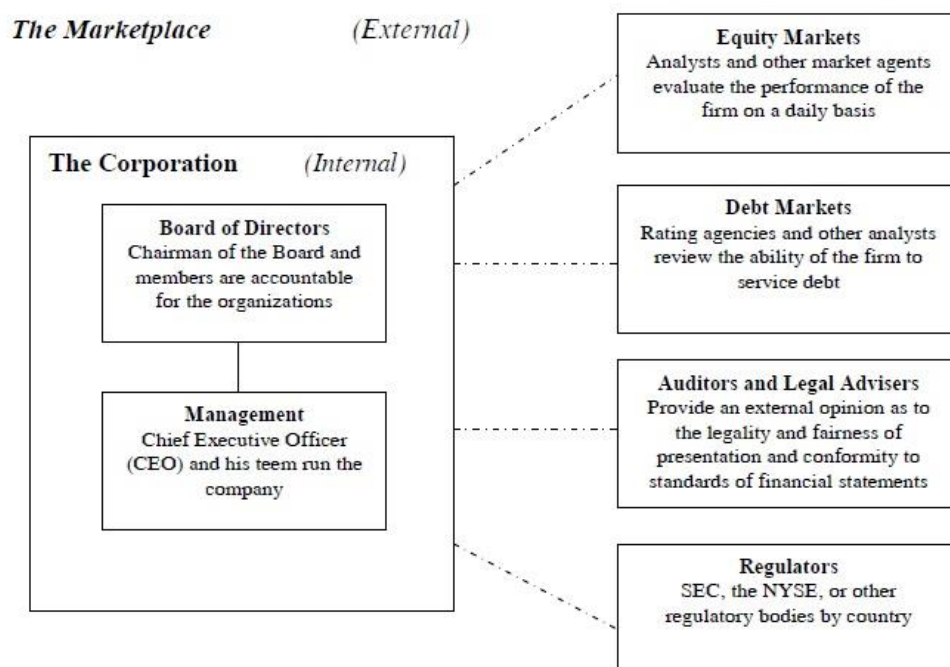
5. *Kewajaran (Fairness)*

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para *investor*. Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan/kewajaran.

2.1.2.3. Struktur *Corporate Governance*

Struktur merupakan suatu bentuk kerangka dasar untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada agar dapat digunakan, bekerja dan melaksanakan suatu fungsi. Struktur *Corporate Governance* merupakan bentuk penggambaran hubungan berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Gambaran dari struktur *Corporate Governance* berguna dalam menentukan arahan strategis, kinerja sistematis dan pengawasan kinerja perusahaan. Struktur didefinisikan sebagai satu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi (Stoner *et al* dalam Arifin, 2005).

Gambar 2.1
Struktur *Corporate Governance*



Sumber: Gray dan Radebaugh (2009)

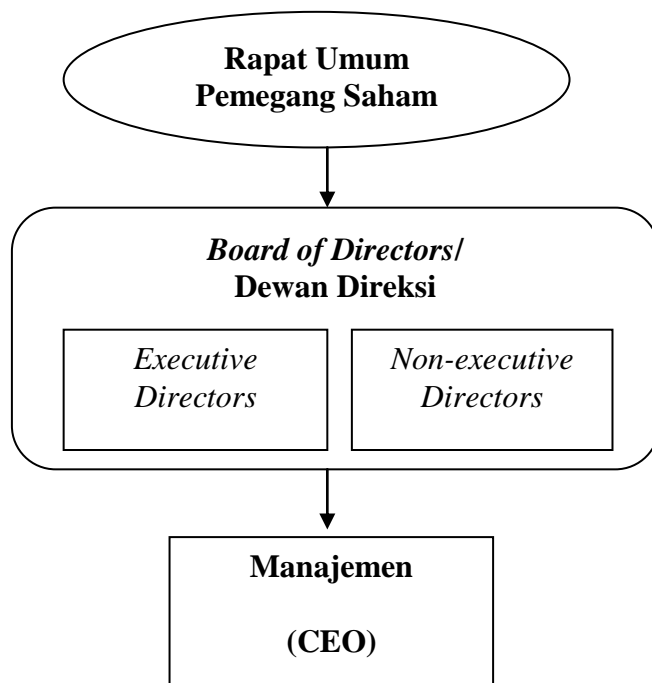
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa struktur *Corporate Governance* terbentuk dari dua mekanisme berbeda yang membentuknya. Kedua mekanisme tersebut yaitu:

1. Struktur mekanisme pengendalian *internal* perusahaan. Pihak- pihak yang terlibat dalam mekanisme internal ini adalah *agent* dan *principal* yang terdiri komposisi *board of directors* dan *executive manajer* di dalam perusahaan. *Board of directors* atau dewan direksi memiliki kewenangan untuk mempekerjakan, memberhentikan, mengawasi dan memberikan kompensasi kepada *top-level decision managers* atau para manajer puncak. Sementara manajemen adalah pihak eksekutif yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional perusahaan (manajer). Mekanisme pengendalian *internal* ini dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun resiko yang disetujui oleh *principal* dan *agent*. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal misalnya adalah pemberian kontrak insentif jangka panjang (Arifin dan Chariri, 2011). Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila kinerja perusahaan meningkat. Dengan demikian, terjadi hubungan yang mutual antara *principal* dan manajer. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang akan membuat modal *principal* berkembang, karena disisi lain hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

2. Struktur mekanisme pengendalian *eksternal*. Struktur mekanisme pengendalian *eksternal* terdiri dari *stakeholder* yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan antara lain Pasar Modal, Pasar Uang, Auditor, Paralegal dan regulator. Struktur mekanisme pengendalian *eksternal* merupakan mekanisme pengendalian yang dibentuk pihak dari luar perusahaan. Mekanisme ini disebut juga dengan mekanisme pengendalian pasar karena mekanisme ini terbentuk oleh hubungan perusahaan dengan pasar, sehingga pengendalian perusahaan dilakukan oleh pasar sendiri.

Arifin (2005) menyebutkan secara umum terdapat 2 (dua) model struktur internal *Corporate Governance* di dunia, yaitu *The Anglo-American system* dan *The Continental Europe system*. Model *Anglo-Saxon* ini disebut dengan *Single-board system*, dimana struktur *governance* terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors (executive directors non-executive directors)*, serta *executive managers* yang dipimpin oleh CEO. *Single board system* merupakan struktur *Corporate Governance* yang tidak memisahkan keanggotaan Dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini anggota Dewan komisaris (*board of commissioners*) juga merangkap anggota dewan direksi. Tidak ada pemisahan antara kedua dewan ini. Dalam struktur *single-board*, kedua dewan ini sama-sama disebut sebagai *board of directors*. Perusahaan-perusahaan di Inggris, Amerika, Kanada serta negara-negara lain umumnya berbasis *single-board system* yang dipengaruhi langsung oleh model *Anglo-Saxon*.

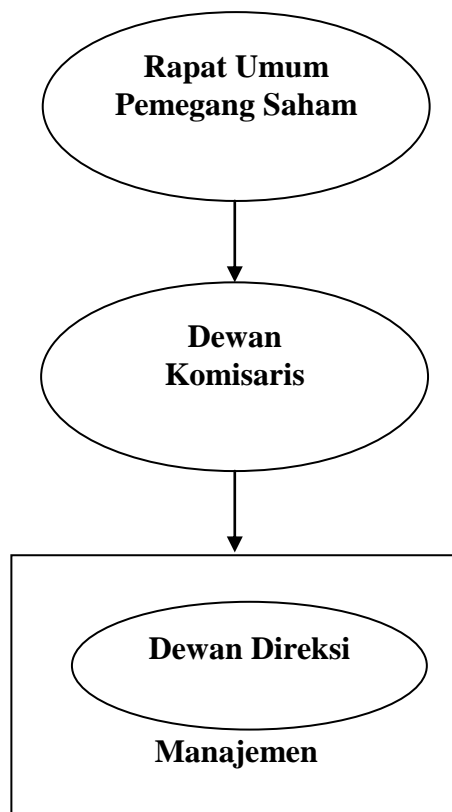
Gambar 2.2
The Anglo-American system atau Single-board system



Sumber : Anyta (2011)

Model *Continental Europe*, struktur *Corporate Governance* terdiri dari RUPS, Dewan komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer Eksekutif (manajemen). Struktur dari *Continental Europe* ini disebut *Two-board system* atau *dual-board system*, yaitu struktur CG yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan direksi dan Dewan komisaris. Dalam struktur ini, keanggotaan *board of commissioners* (dewan komisaris) sebagai dewan pengawas, dan *board of directors* (dewan direksi) atau manajemen sebagai eksekutif perusahaan sebagai eksekutif perusahaan. Model *Continental Europe* merupakan model yang digunakan di Jepang, Jerman, Prancis, Denmark dan Belanda.

Gambar 2.3
Continental Europe System atau Dual-board system

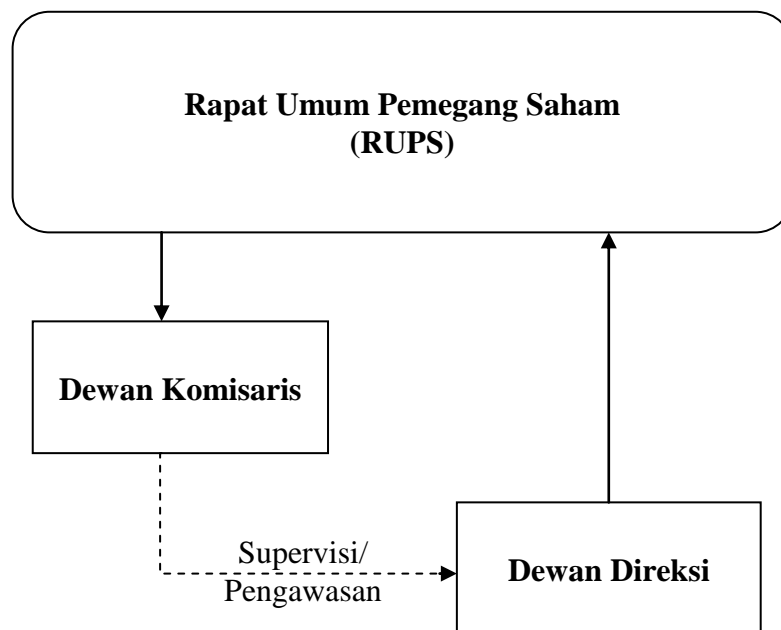


Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005) dalam Arifin (2005)

KNKG (2006) menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut *two-board system* dimana Dewan komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun, penerapan model *two-board system* dalam struktur *governance* di Indonesia berbeda dengan model *Continental Europe*, di mana wewenang pengangkatan dan pemberhentian Direksi berada di tangan RUPS. Sehingga dalam model *two-board system* di Indonesia kedudukan Direksi sejajar dengan kedudukan Dewan komisaris. Ketentuan lebih

lanjut mengenai organ perseroan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Gambar 2.4
Dual-board sistem yang berlaku di Indonesia



Sumber : FCGI(2002)

2.1.3. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya. Mekanisme *Corporate Governance*, terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Struktur *Corporate Governance* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur pengendalian Internal dan struktur pengendalian eksternal. Struktur pengendalian eksternal terdiri dari pihak-pihak berkepentingan yang berasal dari luar perusahaan seperti pasar modal, pasar uang, regulator dan profesi lainnya (paralegal, auditor dan lain sebagainya). Penelitian ini berfokus pada struktur pengendalian internal perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi.

2.1.3.1. Dewan komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam

pengambilan keputusan. Menurut Sembiring (2003) semakin besar jumlah anggota Dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian *internal* tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Sementara *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai inti *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (*shareholder*) dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Ukuran Dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota Dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Hardikasari, 2011).

KNKG (2006) membedakan dewan komisaris menjadi dua kategori. Yang pertama adalah dewan komisaris independen dan yang kedua adalah dewan komisaris non independen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang memiliki hubungan afiliasi

dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan dengan *controlling shareholders*, anggota direksi dan Dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

2.1.3.2. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar aset total yang dimiliki perusahaan. Total asset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya.

Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya.

2.1.5. Kinerja Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting untuk menjelaskan tingkat pengungkapan *corporate governance*. Perusahaan merupakan suatu bentuk entitas tempat terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional yang bekerja secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran dari suatu perusahaan merupakan tujuan yang ingin dicapai semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (*stakeholder and shareholder*). Untuk

mencapai tujuan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan harus bekerja sama secara sistematis demi menghasilkan kinerja yang optimal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut.

Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk refleksi kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas dan sumber daya yang telah dipakai, dicapai dan dilakukan. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Hal ini karena hal tersebut menyangkut aspek-aspek manajemen yang tidak sedikit jumlahnya.

Karena itu, kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variable untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Namun, secara umum penilaian kinerja perusahaan berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja perusahaan secara umum biasanya akan direpresentasikan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan

kecil (Jensen dan Meckling, 1976) . Menurut Bushman (2003) ukuran perusahaan merupakan variabel penting dalam meneliti transparansi perusahaan. Salah satu wujud transparansi perusahaan adalah pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga kemungkinan akan terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*.

Karena penilaian kinerja perusahaan didasarkan pada laporan keuangan, maka untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio inilah yang nantinya akan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dan prospeknya dimasa yang akan datang. Rasio yang umum digunakan untuk melakukan penilaian kinerja keuangan antara lain adalah *Tobin's Q* dan CFROA.

Menurut Darmawati (2004) rasio *Tobin's Q* dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti hubungan antara kepemilikan manajemen dan nilai perusahaan, hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan, akuisisi, dan kebijakan pendanaan,serta dividen, dan kompensasi. Darmawati juga menyatakan bahwa rasio ini dinilai bisa memberikan informasi yang baik, karena dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti terjadinya perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antara kepemilikan saham manajemen, dan nilai perusahaan.

Cash Flow Return On Asset (CFROA) merupakan ratio keuangan lain yang digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan. *CFROA* menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. *CFROA* lebih

memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan saham (Cornett *et al* dalam Sekaredi, 2011).

Penelitian yang menguji *earning management*, *Corporate Governance* dan *true financial performance* pernah dilakukan oleh Cornett, dkk. (2006) dan menemukan adanya pengaruh mekanisme *good Corporate Governanc* terhadap penurunan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif dengan CFROA. Hasil ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa CFROA merupakan fungsi positif dari indikator mekanisme *good corporate governance*. Mekanisme *Good Corporate Governance* dapat mengurangi dorongan manajer melakukan *earning management*, sehingga CFROA yang dilaporkan merefleksikan keadaan yang sebenarnya.

Sebagian peneliti menganggap *Tobin's Q* lebih mampu menjelaskan keadaan perusahaan sebenarnya. Namun volatilitas harga saham yang tinggi akibat pengaruh berbagai faktor makro ekonomi dapat berpengaruh besar dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Hal ini tidak akan terjadi jika kita menggunakan CFROA. Karena pertimbangan tersebut penelitian ini menggunakan CFROA sebagai indikator penilaian kinerja.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang *corporate governance* telah sering dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2004) meneliti hubungan antara *Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survei IICG dan majalah SWA tentang implementasi GCG didalam perusahaan tahun 2001 dan 2002 yaitu CGPI (*Corporate Governance*

Perception Index) sebagai *proxy* variabel *corporate governance*. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi oleh kinerja keuangan (*Return on Equity/ROE*) dan nilai perusahaan (*Tobin's Q*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance* secara statistik signifikan mempengaruhi ROE namun tidak mempengaruhi *Tobin's Q*.

Che Hat *et al.* (2008) yang merumuskan tentang hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitiannya tersebut, Che hat *et al.* (2008) menggunakan variabel *timelines* (ketepatanwaktuan) dan *disclosure* (pengungkapan) sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan *timelines* dan *disclosure*. Selain itu, penelitian ini menemukan pula bahwa *timelines* dan *disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Rini (2010), juga melakukan penelitian tentang luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan pada perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Faktor-faktor yang diuji antara lain besaran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, ukuran dewan komisaris, dan ukuran auditor. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 dan 2008 sebanyak 126 perusahaan.

Hardikasari (2011) juga melakukan penelitian serupa dengan objek perusahaan-perusahaan perbankan. Konsep indikator mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industry perbankan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian Hardikasari (2011) ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, penulis menyusun ringkasan penelitian terdahulu, yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ringkasan penelitian terdahulu

Peneliti	Variabel			Hasil Penelitian
	Bebas	Terikat	Lain	
Darmawati (2004)	Kinerja perusahaan	<i>Corporate Governance</i>	Komposisi aktiva, kesempatan tumbuh,	Variabel <i>corporate governance</i> maupun

			ukuran perusahaan.	variable-variabel kontrol secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan.
Che Hat <i>et al.</i> (2008)	Kinerja perusahaan	<i>Corporate Governance</i>	Ukuran perusahaan, <i>Timelines</i> dan <i>Disclosure</i>	Variabel Mekanisme internal <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
Rini (2010)	Kinerja perusahaan	<i>Corporate governance</i>	Besaran perusahaan, umur <i>listing</i> , kepemilikan dispersasi, perusahaan multinasional, ukuran dewan komisaris	Besaran perusahaan mempengaruhi secara signifikan luas pengungkapan <i>corporate governance</i> . Sedangkan

				variabel yang lain tidak mempengaruhi secara signifikan.
Hardikasari (2011)	Kinerja perusahaan perbankan	<i>Corporate governance</i>	Ukuran perusahaan	Ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan Ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
Iqbal (2012)	Kinerja perusahaan	<i>Corporate governance</i>	Ukuran perusahaan	Jumlah anggota dewan direksi maupun dewan komisaris tidak berpengaruh

				secara signifikan terhadap kinerja perusahaan
--	--	--	--	---

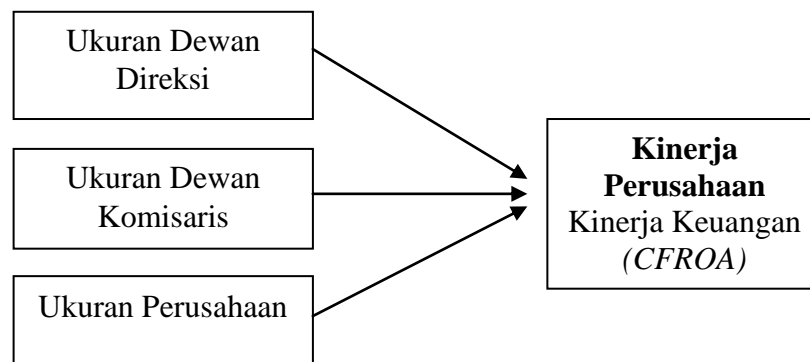
Sumber : Ringkasan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012), sehingga faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi dalam penelitian ini disesuaikan dengan yang digunakan oleh Iqbal (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik jumlah anggota dewan direksi maupun dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012), Selain penulis menguji ukuran dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja perusahaan, penulis juga ingin menambahkan satu *proxy* lagi dalam penelitiannya kali ini yaitu adalah menguji ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator mekanisme internal *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan ukuran keuangan menggunakan CFROA. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini.

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Hubungan antara Ukuran Dewan Direksi dengan Kinerja Perusahaan

Uraian diatas mengandung kesimpulan bahwa Indonesia menganut mekanisme *dual-board system* yang sedikit berbeda dari *two-board system Continental Europe*. Hal ini berarti bahwa di Indonesia terdapat pemisahan peran antara dewan direksi dan dewan komisaris. Masing-masing dewan memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan

perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan koordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada.

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Hardikasari (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil. Penelitian tersebut antara lain penelitian dari Jensen (1993), Lipton dan L'orsch (1992) dan Yermack (1996). Namun demikian, Dalton *et al.* (dalam Hardikasari, 2011) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan kinerja perusahaan.

Dari uraian diatas, jelas bahwa ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam penelitian sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam melihat peran ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.

H_1 : *Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.*

2.4.2. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Kinerja Perusahaan

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dean direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.

Tidak berbeda dengan ukuran dewan direksi, pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan juga menjadi perdebatan tersendiri. Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitiannya tersebut, disebutkan argumen dari Yermack (1996), Sundgren dan Wells (1998), dan Jensen (1993), yang menyatakan bahwa semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris.

Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat

membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian berikutnya yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar *asset* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan perusahaan.

Ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisi lain, perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar. Hesti (2010) dan Uyun (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya. Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas kinerja keuangan mereka. Pelaporan kondisi keuangan yang baik ini tentu tidak serta merta dapat dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua lini perusahaan.

H_3 : *Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Variabel yang pertama merupakan variabel independen yaitu mekanisme internal *Corporate Governance* dan ukuran perusahaan. Variabel yang kedua merupakan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan.

3.1.1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan seluruh kegiatan operasional yang dimilikinya. Dalam hal ini, secara umum hasil kinerja perusahaan dapat dilihat pada kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan hal yang sangat mendasar untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, peneliti menggunakan *Cash Flow Return On Asset* (CFROA). CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva (Iqbal, 2012).

CFROA dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CFROA = \frac{(EBIT + Depc.)}{Asset}$$

Keterangan:

CFROA : Nilai perusahaan

EBIT : Laba sebelum bunga dan pajak

Depc. : Depresiasi (*Depreciation*)

Asset : Total aktiva

3.1.2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran struktur internal *Corporate Governance* dan ukuran perusahaan. Ukuran struktur internal perusahaan terdiri dari ukuran dewan komisaris dan dewan direksi, sedangkan ukuran perusahaan adalah total aset dari perusahaan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini:

1 Ukuran Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara legal dalam mengelola perusahaan. *Ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan* (Iqbal, 2012).

2 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel. *Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan* (Iqbal, 2012).

3 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dimaksud disini adalah seberapa besar asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. *Ukuran perusahaan disini diukur dengan menggunakan proxy total aset yang ada dalam perusahaan* (Iqbal, 2012).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan data yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dipilih dari sebuah populasi untuk mewakili populasi keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia/*Indonesia Stocks Exchange*, selama periode 2010-2012.

Pada dasarnya mekanisme *corporate governance* yang digunakan oleh peneliti berlaku untuk seluruh perusahaan secara global. Namun, peneliti ingin agar penelitian ini lebih spesifik mengenai satu kriteria perusahaan saja, yaitu perusahaan manufaktur. Maka diambil lah sampel perusahaan manufaktur sektor consumer good. Untuk menghitung ukuran sampel, didasarkan pada pendugaan proporsi populasi (Yamane, 1967) menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

d : derajat kepercayaan (0,05)

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data adalah masukan (*input*) yang dapat diolah dan diproses untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang sebelumnya telah ditulis atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Hapsari, 2011).

Penelitian ini menggunakan data-data perusahaan yang terdaftar di BEI/IDX (*Indonesia Stocks Exchange*). Sumber data penelitian ini diambil dari laporan keuangan dan *annual report* tahun 2010-2012.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen. Dalam hal ini, catatan atau dokumen perusahaan yang dimaksud adalah *annual report* perusahaan.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan bentuk analisa data yang berupa angka-angka dan dengan menggunakan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan output analisis lain yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Teknik analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Dalam melakukan analisis regresi berganda diperlukan beberapa langkah dan alat analisis. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 17 (tujuh belas).

3.5.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. Dalam Ghozali (2006) disebutkan bahwa alat analisis yang digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi

data sampel. Ukuran numerik ini merupakan bentuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah pada suatu penjelasan dan penafsiran.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang telah diinput akan diuji Terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data tersebut memenuhi asumsi-asumsi dasar. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari estimasi yang bias. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji Multikolinieritas, dan uji Heteroskedastisitas,

3.5.2.1. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi suatu korelasi diantara variable-variabel bebasnya. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal* (Ghozali, 2006).

Ghozali (2006) menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (multikolinieritas) dalam sebuah model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi (misalnya antara 0.7 dan 1), tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen.

2. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinieritas terjadi apabila nilai *tolerance* dibawah 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berada diatas 10.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Dalam Ghozali (2006) ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas antara lain adalah dengan melakukan uji park, uji glejser, uji white dan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (*dependent*) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

3.5.2.3. Uji Normalitas

Tujuan melakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal, untuk mendeteksi apakah distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara analisis statistik (Ghozali, 2006).

Menurut Ghozali (2006), ada dua cara untuk mengetahui apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak. Cara tersebut adalah dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dengan analisis grafik seringkali menyesatkan jika tidak dilakukan dengan seksama. Hal ini karena secara visual data terlihat normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu, dianjurkan selain menggunakan analisis grafik, penelitian juga menggunakan analisis statistik.

Ada dua cara untuk mengetahui normalitas distribusi residual data dengan analisis statistik. Pertama adalah dengan uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan skewnes dari residual dengan menggunakan rumus. Kedua adalah dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai probabilitas (*Kolmogorov-Smirnov*) < taraf signifikansi, maka distribusi data dikatakan tidak normal dan Jika nilai probabilitas (*Kolmogorov-Smirnov*) > taraf signifikansi, maka distribusi data dikatakan normal.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Terdapat beberapa cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Uji durbin watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya

intercept(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀ : tidak ada autokorelasi

H_A : ada autokorelas

Tabel 3.2
Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi	Tolak	$0 < d < dl$
Positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	Tidak ada keputusan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2006

3.5.3. Analisis Regresi

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah analisis regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya.

Hipotesis yang akan diuji dalam dalam penelitian ini adalah pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan (CFROA).

Mekanisme *Corporate Governance* terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan.

Model pengujian dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan dibawah ini :

$$CFROA = \alpha + \beta_1 DD + \beta_2 DK + \beta_3 CZ + e$$

Keterangan:	CFROA	: Kinerja Perusahaan
	α	: Intercept/konstanta
	$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
	DD	: Ukuran Dewan Direksi
	DK	: Ukuran Dewan Komisaris
	CZ	: Logaritma Natural Ukuran perusahaan
	e	: Error

3.5.3.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2006). Dengan pengukuran koefisien determinasi ini akan dapat diketahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel independen untuk memprediksi variansi variabel dependen.

3.5.3.2. Uji Singifikansi Simultan (Uji F statistik)

Uji F statistik dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan regresi secara keseluruhan berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ini adalah dengan cara

1. Membandingkan F hitung dengan F tabel

Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel independen.

2. Melihat Probabilities values

Probabilities value atau nilai signifikansi lebih besar daripada taraf signifikansi (derajat keyakinan) berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Probabilities value atau nilai signifikansi lebih kecil daripada taraf signifikansi (derajat keyakinan) berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel independen.

3.5.3.3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk mendapatkan bukti apakah hipotesis yang telah dibuat, diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini pengambilan kesimpulan tersebut didapat dari hasil uji parameter individual atau disebut juga uji T statistik. Uji T statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas atau independen secara individual menerangkan variansi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji T dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual/parsial. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yaitu :

1. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel dependen. Jika T hitung lebih besar dari T tabel artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel independen.

2. Menghitung *Probabilities Value*

Probabilities value atau nilai signifikansi digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat signifikansi dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika *probabilitas value* lebih besar daripada taraf signifikansi (derajat keyakinan) berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel independen.

Probabilities value atau nilai signifikansi lebih kecil daripada taraf signifikansi (derajat keyakinan) berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel independen.